**MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan**
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

# KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG BERDAMPAK PADA EKOSISTEM: STUDI LITERATUR SIKLUS KEBIJAKAN DAN DIMENSI EKONOMI PENDIDIKAN

**Saifuddin[1], Zulfikar[2], Uchtiana[3], Fithriani[4], Saiful Bahri[5], Munawar[6]**
Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia [1,2,3,4,5,6]
e-mail: saifibnuasyi@gmail.com [1], zulfikarsd82@gmail.com[2], uchtianacut@gmail.com [3], fithriani572@gmail.com[4], saifulbahri@umuslim.ac.id [5], munawar@umuslim.ac.id [6]

Diterima: *13/10/2026*; Direvisi: *20/10/2026*; Diterbitkan: *4/11/2026*

## ABSTRAK

Keberhasilan kebijakan pendidikan kini dituntut tidak lagi berhenti pada rumusan di atas kertas, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan oleh ekosistem pendidikan di lapangan. Pada kenyataannya, kajian tentang siklus kebijakan, ekonomi pendidikan, dan tata kelola berbasis data masih berjalan terpisah dalam literatur akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis ketiga lensa tersebut guna merumuskan prasyarat kebijakan pendidikan yang berdampak secara berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan tinjauan integratif terhadap buku teks utama, modul perkuliahan, laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, regulasi pembiayaan, serta artikel jurnal bereputasi. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian matriks tematik, dan penarikan kesimpulan terverifikasi. Hasil kajian menunjukkan lima temuan utama, yaitu kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang sarat nilai, berbagai model siklus kebijakan berkonvergensi pada empat tahapan inti, fungsi investasi pendidikan memerlukan prasyarat mutu tata kelola, dampak kebijakan bergantung pada harmonisasi kewenangan multi-level, serta data menjadi landasan penganggaran terarah. Penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual lima komponen berbasis nilai gotong royong yang mempertemukan riset, perumusan partisipatif, pembiayaan terarah, implementasi bertingkat, serta evaluasi berbasis bukti.

**Kata Kunci:** *Ekosistem pendidikan, investasi pendidikan, kebijakan berbasis bukti, kebijakan pendidikan, siklus kebijakan.*

## ABSTRACT

The success of education policy is increasingly required not merely to reside in theoretical formulation on paper, but to deliver tangible impacts experienced directly across the educational ecosystem. In academic practice, studies examining policy cycles, educational economics, and data-driven governance continue to operate in isolation. This study aims to synthesize these three distinct analytical perspectives to formulate the foundational prerequisites for impactful educational policies. The research employed an integrative literature review analyzing foundational textbooks, course modules, official ministry portals, fiscal policy announcements, and supporting journal articles. Data were systematically examined through data condensation, thematic matrix displays, and verified conclusion drawing. The synthesis reveals five core findings: education policy represents value-laden public policy, diverse cycle models converge on four essential stages, educational investment necessitates robust governance quality, policy effectiveness depends on multilevel governance alignment, and empirical evidence serves as the bedrock for targeted financing. This study proposes an integrative five-component conceptual framework grounded in mutual cooperation (gotong

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

royong) connecting rigorous research, participatory formulation, aligned funding, multilevel implementation, and evidence-based evaluation.

**Keywords:** *Education ecosystem, education investment, education policy, evidence-based policy, policy cycle.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam peradaban manusia karena menjadi sarana pembinaan potensi individu secara optimal dan berkelanjutan. Sektor ini berkontribusi nyata dalam memutus rantai kemiskinan, mengatasi kebodohan, dan mempercepat kemajuan bangsa, sehingga menuntut perhatian serius dari pemerintah (Pratiwi, 2024). Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan kerangka kebijakan yang sistematis sebagai payung hukum dan pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan (Pratiwi, 2024). Di Indonesia, amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan perluasan akses, peningkatan mutu pendidik, pembaruan kurikulum, dan penguatan tata kelola terdesentralisasi (Khairi, n.d.). Kebijakan otonomi daerah kemudian memberikan landasan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola layanan pendidikan secara kontekstual (Khairi, n.d.; Nansi, 2024).

Meskipun landasan yuridis telah terbangun kokoh, disparitas mutu dan akses pendidikan antarwilayah masih menjadi kendala yang belum teratasi sepenuhnya. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa perumusan kebijakan publik pada hakikatnya tidak pernah netral dari kepentingan politik dan tarik-menarik kekuasaan (Putra, 2024). Penurunan iklim keamanan sekolah pada jenjang menengah berdasarkan data Rapor Pendidikan nasional mempertegas belum optimalnya fungsi proteksi institusi pendidikan (Putra, 2024). Hambatan tersebut diperparah oleh keterbatasan sarana prasarana daerah 3T, disparitas kompetensi guru, serta lemahnya pengawasan program (Kwartarani et al., 2025). Akibatnya, penyelesaian masalah pendidikan secara parsial sering kali memicu kerentanan baru pada aspek tata kelola lainnya (Samsilayurni & Surismiati, n.d.).

Perkembangan wacana kontemporer kian menegaskan perlunya reorientasi paradigma kebijakan dari sekadar pemenuhan administratif menuju penciptaan dampak konkret di lapangan. Arahan resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggarisbawahi bahwa efektivitas kebijakan harus diukur dari transformasi mutu yang dirasakan langsung oleh ekosistem satuan pendidikan (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan [Puslapdik], 2026). Kebijakan pendidikan dituntut untuk mengintegrasikan bukti ilmiah, rumusan regulasi, dan praktik pembelajaran melalui kolaborasi multipihak berbasis gotong royong (Puslapdik, 2026). Penguatan basis data melalui Rapor Pendidikan diarahkan menjadi kompas evaluasi diri bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam merefleksikan akar masalah mutu (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan [PSKP], 2026a, 2026b). Prinsip akuntabilitas berbasis data ini diterapkan pula dalam tata kelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kinerja agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan substansial (Prayoga, 2026).

Kajian literatur terdahulu memperlihatkan adanya fragmentasi konseptual yang membatasi analisis kebijakan pendidikan secara utuh. Studi sosiologis dan politik cenderung menyoroti tahapan siklus formulasi regulasi dan relasi kekuasaan elite birokrasi tanpa mengkaji implikasi alokasi fiskalnya (Rusdiana, 2015; Samsilayurni & Surismiati, n.d.; Yunitasari, 2024). Di sisi lain, literatur ekonomi pendidikan konvensional lebih berfokus pada penghitungan tingkat pengembalian investasi (*rate of return*) dan fungsi modal manusia secara makro, namun mengabaikan dinamika friksi implementasi di tingkat birokrasi daerah (Hanushek & Woessmann, 2010; Khairi, n.d.). Sementara itu, evaluasi program sektoral seperti

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

sekolah gratis atau Merdeka Belajar kerap mengkaji capaian output jangka pendek tanpa menghubungkannya dengan ekosistem data tata kelola jangka panjang (Atin, 2024; Missouri, 2024; Mudatsir, 2024). Fragmentasi ini menyisakan celah riset (*research gap*) yang mendalam mengenai bagaimana siklus regulasi, kalkulasi ekonomi, dan sistem data dapat disintesiskan menjadi kerangka kebijakan terpadu.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan ketiga perspektif teoretis tersebut guna merumuskan kerangka kebijakan pendidikan yang berdampak bagi ekosistem. Secara spesifik, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana konsep, karakteristik, dan siklus kebijakan pendidikan dikonseptualisasikan dalam literatur? Kedua, bagaimana dimensi ekonomi membingkai kebijakan pendidikan sebagai investasi dan pemenuhan barang publik? Ketiga, apa prasyarat yang memungkinkan kebijakan pendidikan berdampak optimal pada level makro, meso, dan mikro? Hasil kajian diharapkan memberikan peta konseptual bagi akademisi serta pedoman strategis bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi berbasis bukti (*evidence-based policy*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tinjauan integratif (*integrative review*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan mengkritisi, menyatukan, dan mengintegrasikan beragam literatur teoretis dan regulasi mutakhir lintas disiplin ilmu (Snyder, 2019). Tinjauan integratif memungkinkan peneliti menggabungkan perspektif administrasi publik, ekonomi pendidikan, dan tata kelola data pendidikan secara komprehensif. Melalui sintesis kualitatif, konsep-konsep yang semula terpisah dapat dipadukan untuk menghasilkan kerangka konseptual baru yang lebih adaptif terhadap tantangan ekosistem pendidikan kontemporer.

Korpus data penelitian dihimpun dari tiga kelompok sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan tematik yang kuat. Kelompok pertama adalah buku teks dan modul rujukan utama mengenai teori kebijakan dan ekonomi pendidikan (Khairi, n.d.; Purnomo, 2024; Rusdiana, 2015; Samsilayurni & Surismiati, n.d.). Kelompok kedua mencakup dokumen kebijakan resmi kementerian, siaran pers, dan data regulasi program pembiayaan pendidikan (Prayoga, 2026; PSKP, 2026a, 2026b; Puslapdik, 2026). Kelompok ketiga terdiri atas artikel jurnal ilmiah dan bab buku pendukung yang menelaah mutu pendidikan serta kerangka metodologi penelitian (Hanushek & Woessmann, 2010, 2012; Kwartarani et al., 2025; Miles et al., 2014; Snyder, 2019). Pemetaan menyeluruh terhadap seluruh korpus data yang dianalisis disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Korpus Sumber Data Penelitian**

| Kode | Sumber Referensi | Jenis Dokumen | Fokus Tematik yang Dianalisis |
|---|---|---|---|
| **K1** | Khairi (n.d.) | Modul perkuliahan UT | Konsep dasar; modal manusia; pendidikan investasi dan konsumsi |
| **K2** | Purnomo (Ed., 2024) | Buku bunga rampai | Formulasi, implementasi, otonomi daerah, program afirmasi, monev |
| **K3** | Samsilayurni & Surismiati (n.d.) | Buku ajar perkuliahan | Model dan tahapan kebijakan; kewenangan makro, meso, dan mikro |

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

| | | | |
|---|---|---|---|
| **K4** | Rusdiana (2015) | Buku teks referensi | Teori kebijakan publik; partisipasi masyarakat; implementasi |
| **K5** | Puslapdik (2026) | Laman berita resmi | Kebijakan berdampak ekosistem; integrasi riset, kebijakan, dan praktik |
| **K6** | PSKP (2026a, 2026b) | Portal dan siaran pers | Standar nasional; evaluasi kebijakan; validitas Dapodik dan Rapor Pendidikan |
| **K7** | Prayoga (2026) | Pemberitaan kebijakan | BOSP Kinerja berbasis diagnosis masalah dan data Rapor Pendidikan |
| **K8** | Hanushek & Woessmann (2010, 2012); Kwartarani et al. (2025); Miles et al. (2014); Snyder (2019) | Artikel jurnal dan buku metodologi | Mutu kognitif; tata kelola mutu; tahapan analisis data dan tinjauan pustaka |

Berdasarkan pengelompokan korpus data pada Tabel 1, proses penyaringan literatur dilakukan secara ketat dengan memperhatikan relevansi isi terhadap fokus kajian. Sumber kepustakaan yang diprioritaskan mencakup pembahasan konseptual siklus kebijakan, fungsi alokasi ekonomi, serta dinamika implementasi tata kelola pendidikan. Informasi yang dihimpun pada Tabel 1 dianalisis secara berkesinambungan guna menjaga ketelitian sintesis antar-sumber. Prosedur telaah pustaka dijalankan secara sistematis mulai dari penetapan kriteria inklusi hingga penarikan kesimpulan teoretis.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan bersamaan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap kondensasi data, seluruh proposisi dikelompokkan ke dalam lima tema utama, yakni hakikat kebijakan publik, siklus perumusan, dualisme ekonomi pendidikan, tata kelola multi-level, dan bukti empiris. Tahap penyajian data disajikan melalui matriks perbandingan konseptual dan diagram alur sistematis. Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan mengonfrontasikan teori normatif buku teks terhadap data empiris kebijakan mutakhir guna menghasilkan kesimpulan yang sahih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Temuan 1: Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik yang Bernilai dan Berjenjang

Hasil sintesis literatur menegaskan kesepakatan bahwa kebijakan pendidikan merupakan turunan substantif dari kebijakan publik yang beroperasi dalam sistem ketatanegaraan. Kebijakan publik dipahami sebagai rangkaian ketetapan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi kepentingan bersama (Rusdiana, 2015). Kebijakan pendidikan dirumuskan oleh otoritas negara guna mengarahkan alokasi sumber daya dan membina nilai sosial secara sah (Pratiwi, 2024; Rusdiana, 2015). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan senantiasa terkait dengan dinamika kekuasaan politik sejak tahap perancangan hingga evaluasi akhir di masyarakat (Putra, 2024; Rusdiana, 2015). Konsep dasar kebijakan pendidikan dan implikasinya terhadap penciptaan dampak sistemik dirangkum secara tematik pada Tabel 2.

**Tabel 2. Sintesis Konsep Kebijakan Pendidikan dalam Sumber Utama**

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

| Rujukan Konseptual | Pokok Gagasan Teoretis | Implikasi bagi Kebijakan Berdampak |
|---|---|---|
| **Good (dalam Rusdiana, 2015)** | Pertimbangan berbasis sistem nilai dan penilaian situasional sebagai pedoman keputusan | Kebijakan wajib memadukan nilai etis dengan kondisi objektif lapangan |
| **Tilaar & Nugroho (dalam Rusdiana, 2015)** | Penjabaran operasional visi dan misi pendidikan dalam kurun waktu strategis | Kebijakan merupakan proses transformasi berkesinambungan |
| **Elwijaya et al. (dalam Darwiyanti, 2024)** | Perumusan langkah terarah guna mencapai tujuan pendidikan nasional | Menuntut konsistensi antara desain makro dan eksekusi mikro |
| **Setiawan et al. (dalam Samsilayurni & Surismiati, n.d.)** | Pendekatan interdisipliner dan analisis kontekstual dalam perumusan | Analisis data valid diperlukan sebelum penetapan intervensi |
| **Pratiwi (2024)** | Keputusan otoritatif pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa | Keberhasilan diukur dari kemaslahatan masyarakat luas |

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan yang berdampak menuntut adanya integrasi yang selaras antara sistem nilai, kebutuhan masyarakat, dan perencanaan yang matang. Dimensi operasional menuntut pemenuhan legalitas hierarki perundang-undangan dan keterbukaan terhadap perbaikan berkelanjutan (Rusdiana, 2015). Penataan regulasi harus menjembatani kebutuhan individu dengan sasaran pembangunan nasional (Pratiwi, 2024; Samsilayurni & Surismiati, n.d.). Dengan demikian, rumusan pada Tabel 2 mengonfirmasi bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai dokumen statis, melainkan instrumen dinamis yang sarat nilai dan berorientasi pada kemajuan ekosistem pendidikan.

Temuan 2: Konvergensi Model Siklus Kebijakan pada Empat Tahapan Inti

Kajian pustaka mengidentifikasi keberagaman model perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar administrasi publik dan pendidikan. Walaupun memiliki variasi istilah dan jumlah tahapan, seluruh model tersebut bertemu pada empat siklus fundamental, yaitu penetapan agenda masalah, formulasi alternatif, eksekusi implementasi, dan evaluasi hasil (Pratiwi, 2024; Rusdiana, 2015; Samsilayurni & Surismiati, n.d.; Yunitasari, 2024). Komparasi analitis terhadap model-model siklus kebijakan tersebut disajikan secara rinci pada Tabel 3.

**Tabel 3. Perbandingan Model Tahapan Siklus Kebijakan Pendidikan**

| Rujukan Literatur | Tahapan Siklus Kebijakan | Karakteristik dan Fokus Utama |
|---|---|---|
| **Dunn (dalam Pratiwi, 2024)** | Penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, penilaian | Penilaian kinerja kebijakan oleh seluruh cabang kekuasaan negara |
| **Lindblom (dalam Samsilayurni & Surismiati, n.d.)** | Penetapan agenda, formulasi, pengesahan, pelaksanaan, evaluasi | Penelusuran dinamika masuknya aspirasi publik ke agenda formal |
| **Dye (dalam Samsilayurni & Surismiati, n.d.)** | Identifikasi masalah, agenda, usulan program, legitimasi, aplikasi, evaluasi | Menempatkan kebijakan sebagai produk kompromi politik |
| **Oktavia et al. (dalam Samsilayurni & Surismiati, n.d.)** | Inisiasi, estimasi alternatif, seleksi, implementasi, evaluasi, terminasi | Penekanan pada opsi penghentian program yang tidak relevan |

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

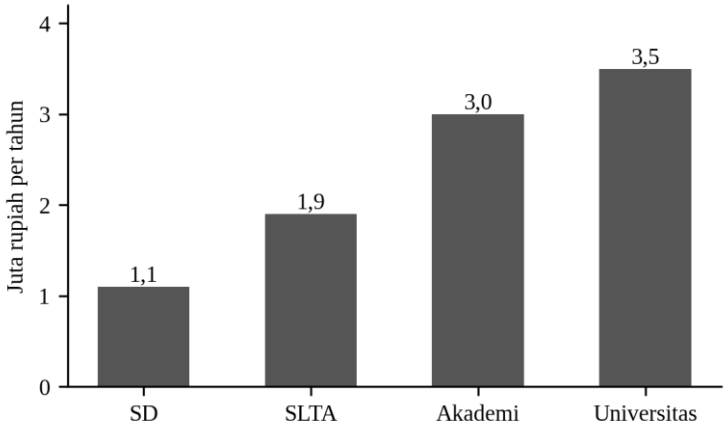
MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

| | | |
|---|---|---|
| **Yunitasari (2024)** | Konsultasi pemangku kepentingan, prioritas masalah, perancangan, uji coba, implementasi, monitoring, revisi | Pendekatan uji coba bertahap (*piloting*) dan revisi adaptif |
| **Jones (dalam Rusdiana, 2015)** | Pengorganisasian sumber daya, interpretasi aturan, penerapan layanan | Perincian operasionalisasi pelaksanaan pada tingkat birokrasi |

Berdasarkan perbandingan model pada Tabel 3, efektivitas siklus kebijakan sangat ditentukan oleh mekanisme umpan balik yang menghubungkan evaluasi dengan perbaikan formulasi awal. Pemisahan kaku antara perumus dan pelaksana kebijakan sering kali menjadi pemicu kegagalan implementasi di lapangan (Rusdiana, 2015). Model perumusan deliberatif yang melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan terbukti lebih akuntabel dibandingkan model teknokratis murni (Samsilayurni & Surismiati, n.d.). Penyelenggaraan uji coba terbatas (*piloting*) sebagaimana terangkum pada Tabel 3 menjadi filter penting untuk menguji kesiapan instrumen kebijakan sebelum diterapkan secara nasional.

Temuan 3: Dualitas Pendidikan sebagai Investasi Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Konsumsi Publik

Literatur ekonomi pendidikan menempatkan pendidikan dalam perspektif ganda, yakni sebagai investasi modal manusia (*human capital*) sekaligus konsumsi hak asasi warga negara. Sebagai investasi, pendidikan dipandang menghasilkan imbal hasil ekonomi di masa depan melalui peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan individu (Hanushek & Woessmann, 2010; Khairi, n.d.). Hubungan empiris antara jenjang pendidikan yang ditamatkan dengan rata-rata tingkat pendapatan individu di Indonesia diilustrasikan pada Gambar 1.




**Gambar 1. Rata-rata Pendapatan Tahunan menurut Jenjang Pendidikan di Indonesia (Adaptasi Khairi, n.d.)**

Grafik pada Gambar 1 menunjukkan adanya kenaikan pendapatan yang linear seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang diselesaikan individu. Peningkatan tajam yang tampak pada Gambar 1 memberikan pembenaran teoretis bagi alokasi pembiayaan publik dan privat pada sektor pendidikan formal. Namun demikian, kalkulasi finansial tersebut harus diimbangi oleh pemahaman bahwa pendidikan dasar merupakan hak asasi yang bersifat non-rival dan non-eksklusi (Khairi, n.d.). Perbandingan konseptual antara fungsi investasi dan fungsi konsumsi pendidikan disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Perbandingan Dimensi Pendidikan sebagai Investasi dan Konsumsi**

| Dimensi Analisis | Pendidikan sebagai Investasi | Pendidikan sebagai Konsumsi |
|---|---|---|

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

| | | |
|---|---|---|
| **Landasan Teori** | Teori modal manusia; nilai imbal hasil finansial (*rate of return*) | Hak asasi manusia; amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 31 |
| **Orientasi Manfaat** | Jangka panjang; peningkatan kapasitas produksi dan ekonomi | Jangka pendek dan menengah; pemenuhan martabat dan nalar |
| **Bentuk Keluaran** | Peningkatan penghasilan, mobilitas kerja, dan devisa | Kematangan emosional, kohesi sosial, dan literasi warga |
| **Tanggung Jawab Fiskal** | Beban bersama antara pemerintah, industri, dan keluarga | Kewajiban mutlak negara melalui program wajib belajar |
| **Klasifikasi Barang** | Barang kuasi-publik hingga barang privat pada jenjang tinggi | Barang publik murni pada jenjang pendidikan dasar |

Tabel 4 menegaskan bahwa intervensi kebijakan harus menyeimbangkan alokasi fiskal agar perluasan akses tidak mengorbankan mutu pembelajaran. Peningkatan anggaran sekolah tidak serta-merta mendorong pertumbuhan ekonomi jika tata kelola kelembagaan dan kualitas kompetensi guru diabaikan (Hanushek & Woessmann, 2012; Khairi, n.d.). Program afirmasi seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) terbukti efektif memperluas angka partisipasi kasar, namun masih menghadapi tantangan mutu pembelajaran (Atin, 2024; Missouri, 2024). Sintesis pada Tabel 4 memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan pembiayaan harus berorientasi pada penciptaan nilai tambah kognitif yang nyata, bukan sekadar penyerapan dana administratif.

Temuan 4: Harmonisasi Kewenangan Multilevel Makro, Meso, dan Mikro sebagai Penentu Dampak

Desentralisasi pendidikan bertujuan mendekatkan proses pengambilan keputusan dengan konteks kebutuhan riil peserta didik di daerah (Nansi, 2024). Namun, pelaksanaan otonomi daerah berisiko melahirkan fragmentasi standar mutu apabila koordinasi lintas jenjang pemerintahan tidak terkelola dengan baik (Kwartarani et al., 2025; Samsilayurni & Surismiati, n.d.). Pembagian peran dan instrumen kebijakan pada tingkat makro, meso, dan mikro dipaparkan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Matriks Kewenangan dan Instrumen Kebijakan Pendidikan Multilevel**

| Level Tata Kelola | Aktor Pembuat Kebijakan | Fokus Sasaran dan Instrumen Kebijakan |
|---|---|---|
| **Makro (Nasional)** | Presiden, Menteri Pendidikan, DPR RI, Bappenas | Kurikulum nasional, standar mutu, regulasi fiskal, evaluasi sistemik |
| **Meso (Provinsi & Kab/Kota)** | Gubernur, Bupati/Walikota, Dinas Pendidikan, DPRD | Pengelolaan satuan pendidikan menengah dan dasar, distribusi guru, muatan lokal |
| **Mikro (Satuan Pendidikan)** | Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Pengawas | Manajemen Berbasis Sekolah, kurikulum operasional, evaluasi diri sekolah |

Data pada Tabel 5 mengonfirmasi bahwa keberhasilan kebijakan makro bergantung mutlak pada kesiapan kapasitas teknis dan integritas kepemimpinan di tingkat meso dan mikro. Ketidaksiapan aparatur daerah dan kepala sekolah dalam mengelola otonomi sering kali memicu tumpang tindih regulasi dan inefisiensi anggaran (Samsilayurni & Surismiati, n.d.). Partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan harus ditransformasikan dari keterlibatan administratif formalitas menjadi pengawasan mutu yang substantif (Rusdiana, 2015). Sinergi ketiga level pada Tabel 5 menjadi syarat mutlak agar tujuan transformasi pendidikan dapat terwujud secara nyata di ruang kelas.

Temuan 5: Bukti Empiris dan Ekosistem Data sebagai Landasan Intervensi Kebijakan

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

Kebijakan pendidikan kontemporer menunjukkan pergeseran nyata menuju paradigma tata kelola berbasis data empiris (*evidence-based policy*) (Puslapdik, 2026). Platform Rapor Pendidikan yang mengintegrasikan Asesmen Nasional, Dapodik, dan data kementerian berfungsi sebagai instrumen diagnostik bagi pembenahan mutu sekolah (PSKP, 2026a, 2026b). Di sisi pembiayaan, penyaluran BOSP Kinerja tahun 2026 diwajibkan berbasis pada refleksi akar masalah yang teridentifikasi dalam Rapor Pendidikan (Prayoga, 2026). Perubahan orientasi ini menuntut integritas data pokok dan kapasitas manajerial kepala sekolah agar anggaran dialokasikan tepat sasaran pada peningkatan mutu pembelajaran (Kwartarani et al., 2025; Prayoga, 2026).

**Pembahasan**

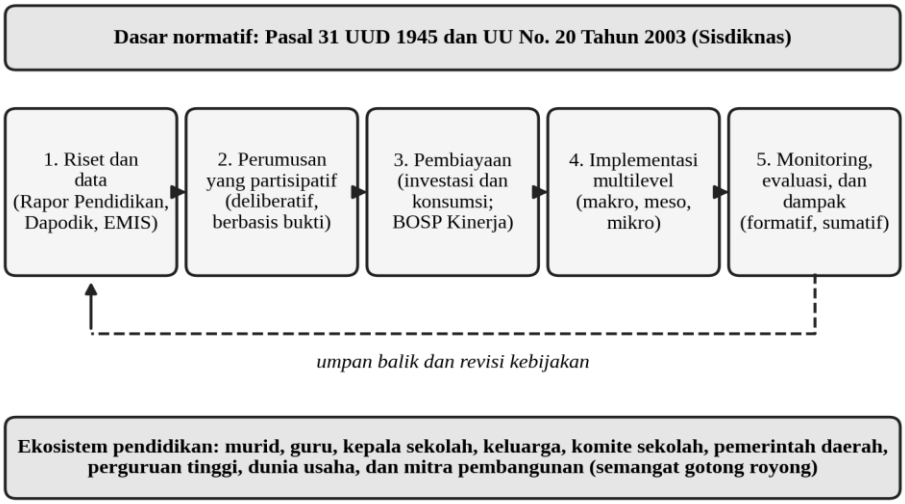
Hasil kajian memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan ditentukan oleh pergeseran orientasi dari perumusan teknokratis elitis menuju perumusan deliberatif yang partisipatif. Teori elite mengingatkan bahwa kebijakan kerap dibajak oleh kepentingan politik sempit yang meminggirkan kebutuhan masyarakat akar rumput (Rusdiana, 2015; Samsilayurni & Surismiati, n.d.). Penegasan resmi pemerintah bahwa mutu kebijakan diukur dari dampak yang dirasakan murid dan guru menjadi koreksi substantif terhadap formalisme birokrasi (Puslapdik, 2026). Partisipasi masyarakat yang bermakna dan ketersediaan data empiris yang akurat berfungsi sebagai benteng penyeimbang agar kebijakan tetap berpihak pada keadilan sosial. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pendidikan perlu melibatkan para pemangku kepentingan sejak tahap awal serta didahului oleh kajian mendalam yang melibatkan para ahli dan akademisi agar implementasinya lebih efektif (Anwar et al., 2025; Cahyanto et al., 2025; Hidayati et al., 2026; Nurhayati et al., 2024).

Kajian ekonomi pendidikan melengkapi kesimpulan tersebut dengan menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan harus berfokus pada hasil belajar (*learning outcomes*). Analisis ekonometrika membuktikan bahwa peningkatan kecakapan kognitif peserta didik merupakan determinan utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar lamanya waktu bersekolah (Hanushek & Woessmann, 2010, 2012). Oleh karena itu, komitmen anggaran 20 persen dari APBN harus ditransformasikan menjadi program intervensi yang meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi guru serta murid (Khairi, n.d.; Kwartarani et al., 2025). Kebijakan pengalokasian dana BOSP Kinerja berbasis diagnosis masalah menjadi model reformasi fiskal yang menjembatani akuntabilitas anggaran dengan capaian mutu nyata (Prayoga, 2026). Ketersediaan data hasil evaluasi sekolah yang sistematis menjadi prasyarat agar setiap keputusan alokasi dana dapat ditelusuri kembali dampaknya terhadap peningkatan literasi dan numerasi peserta didik (Hidayah et al., 2025; Perdana & Ritonga, 2026; Putra et al., 2025; Ratnawati et al., 2025; Widiyawati et al., 2025).

Sintesis menyeluruh dari temuan penelitian ini dirumuskan ke dalam kerangka konseptual kebijakan pendidikan yang berdampak pada ekosistem. Kerangka ini memadukan riset berbasis bukti, perumusan partisipatif, penganggaran terarah, implementasi multilevel yang selaras, serta evaluasi formatif-sumatif yang teratur. Integrasi dinamis antarkomponen kebijakan tersebut digambarkan secara komprehensif pada Gambar 2.

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial




**Gambar 2. Kerangka Konseptual Kebijakan Pendidikan yang Berdampak pada Ekosistem**

Gambar 2 mengilustrasikan alur siklus terpadu di mana data empiris menjadi titik awal formulasi dan sekaligus tolok ukur akhir keberhasilan intervensi. Keterkaitan sirkular pada Gambar 2 menolak pemisahan kaku antara perumus kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksana kebijakan di tingkat sekolah. Mekanisme umpan balik yang adaptif memastikan bahwa setiap kelemahan operasional di lapangan dapat langsung direvisi pada siklus kebijakan berikutnya. Kerangka konseptual pada Gambar 2 ini diterjemahkan lebih lanjut ke dalam indikator operasional pada Tabel 6.

**Tabel 6. Prinsip dan Indikator Dampak pada Setiap Komponen Kerangka Kebijakan**

| Komponen Kerangka | Prinsip Utama Kebijakan | Indikator Dampak yang Terukur | Landasan Rujukan |
|---|---|---|---|
| **1. Riset dan Basis Data** | Keputusan bertumpu pada validitas dan kemutakhiran bukti empiris | Ketepatan pemutakhiran Dapodik; pemanfaatan Rapor Pendidikan | PSKP (2026b); Puslapdik (2026) |
| **2. Perumusan Partisipatif** | Melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi lapangan | Konsultasi publik bermakna; kejelasan indikator keberhasilan | Rusdiana (2015); Yunitasari (2024) |
| **3. Pembiayaan Terarah** | Alokasi anggaran berbasis diagnosis masalah dan target mutu | Penurunan disparitas sarana; efektivitas belanja BOSP Kinerja | Khairi (n.d.); Prayoga (2026) |
| **4. Implementasi Multilevel** | Harmonisasi kewenangan pusat, daerah, dan satuan pendidikan | Ketiadaan tumpang tindih aturan; kemandirian tata kelola sekolah | Kwartarani et al. (2025); Samsilayurni & Surismiati (n.d.) |
| **5. Monitoring dan Evaluasi** | Penilaian proses secara berkala dan evaluasi dampak objektif | Tindak lanjut hasil temuan audit; peningkatan capaian siswa | Alwi (2024); Rusdiana (2015) |

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

Prinsip dan indikator pada Tabel 6 memberikan acuan praktis bagi pembuat kebijakan untuk menilai kesiapan program sebelum diterapkan secara luas. Pendekatan ini menuntut penguatan kapasitas kepemimpinan instruksional bagi kepala sekolah dan aparatur dinas pendidikan daerah (Prayoga, 2026). Partisipasi komite sekolah diarahkan untuk mengawal transparansi belanja sekolah agar tepat sasaran pada kebutuhan belajar murid (Asnawi et al., 2025; Asrofi et al., 2025; Halima et al., 2022; Siregar et al., 2022; Susisanti, 2022). Penerapan kerangka kerja pada Tabel 6 diharapkan mampu mentransformasi tata kelola pendidikan Indonesia menjadi lebih tangguh, adaptif, dan berkeadilan sosial. Keberhasilan transformasi tersebut bergantung pada konsistensi evaluasi berkala yang melibatkan data capaian belajar murid serta masukan dari guru, orang tua, dan masyarakat (Kudus & Sutanto, 2024; Syafi'i et al., 2023; Yuza & Jannah, 2026). Mekanisme umpan balik semacam ini perlu didokumentasikan secara terbuka agar setiap rekomendasi perbaikan kebijakan dapat ditelusuri kembali ke bukti capaian belajar yang dikumpulkan di tingkat satuan pendidikan.

Kajian ini memiliki keterbatasan yang bersumber pada penggunaan metode telaah dokumen sekunder dan kepustakaan teoretis. Sebagian dokumen kebijakan tahun 2026 berwujud siaran pers regulasi yang memerlukan verifikasi empiris jangka panjang. Selain itu, dinamika sosiopolitik antardaerah yang sangat majemuk menuntut penyesuaian kontekstual dalam mengimplementasikan kerangka kerja yang diusulkan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji validitas empiris indikator Tabel 6 melalui riset evaluasi dampak kebijakan pembiayaan di berbagai daerah percontohan di Indonesia. Hasil uji lapangan tersebut nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyempurnakan indikator Tabel 6 sebelum kerangka kerja ini diadopsi sebagai standar nasional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penciptaan kebijakan pendidikan yang berdampak menuntut peleburan tiga dimensi utama yang selama ini terfragmentasi, yakni siklus kebijakan yang adaptif, fungsi alokasi ekonomi yang berbasis mutu, dan ekosistem data yang terpercaya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang sarat nilai dan beroperasi secara multilevel, di mana keberhasilannya bergantung pada harmonisasi kewenangan antara tingkat makro, meso, dan mikro. Pembiayaan pendidikan tidak boleh dimaknai sekadar sebagai belanja sosial rutin, melainkan investasi strategis modal manusia yang dampaknya hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh kualitas pembelajaran yang unggul. Kebijakan berbasis bukti seperti pemanfaatan Rapor Pendidikan dan BOSP Kinerja membuktikan bahwa diagnosis masalah yang tepat merupakan prakondisi mutlak bagi alokasi anggaran yang berkeadilan.

Kerangka konseptual lima komponen yang diajukan—riset dan data, perumusan partisipatif, pembiayaan terarah, implementasi multilevel, serta monitoring dan evaluasi—menawarkan peta jalan tata kelola pendidikan berbasis semangat gotong royong. Keberhasilan implementasi kerangka ini menuntut komitmen aparatur pemerintah untuk menggeser fokus kinerja dari kepatuhan administratif menuju akuntabilitas hasil belajar murid. Penguatan kapasitas perencanaan berbasis data di tingkat dinas pendidikan dan satuan pendidikan harus diprioritaskan guna mencegah inefisiensi anggaran. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menguji keterterapan indikator kerangka konseptual ini melalui penelitian lapangan empiris pada program-program afirmasi pendidikan nasional yang sedang berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alwi, M. (2024). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Dalam A. C. Purnomo (Ed.), *Kebijakan pendidikan* (hlm. 238–250). Sada Kurnia Pustaka.

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Hasbar, H., Payung, L. T., & Kesuma, A. H. (2025). Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia: Pendekatan CIPP dan perspektif keadilan sosial. *Journal of Education Research*, *6*(3), 739–750. https://doi.org/10.37985/jer.v6i3.2576

Asnawi, S., Nurmiyati, N., & Suryatama, F. (2025). Menakar efektivitas BOS sekolah menengah pertama: Studi empiris terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di Kabupaten Semarang. *Jurnal Sosial dan Sains*, *5*(2), 272–286. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i2.32051

Asrofi, I., Sriyanti, I., Budiman, I., & Sunarsah, E. (2025). Peran strategis komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMA: Implikasi dari Pergub 97 Tahun 2022. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *5*(2), 178–188. https://doi.org/10.36456/p.v5i2.10581

Atin, S. (2024). Kebijakan program wajib belajar. Dalam A. C. Purnomo (Ed.), *Kebijakan pendidikan* (hlm. 141–155). Sada Kurnia Pustaka.

Cahyanto, I., Natsir, L. F., & Hidayat, T. (2025). Designing a stakeholder engagement model in educational policy decision-making: A critical literature review. *Edum Journal*, *8*(1), 153–168. https://doi.org/10.31943/edumjournal.v8i1.327

Darwiyanti, A. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan. Dalam A. C. Purnomo (Ed.), *Kebijakan pendidikan* (hlm. 38–53). Sada Kurnia Pustaka.

Halima, S., Badarwan, B., & Sangila, M. S. (2022). The role of the school committee in realizing the strategic plan at SMAN 1 Tongkuno (Peran komite sekolah dalam mewujudkan rencana strategis di SMAN 1 Tongkuno). *Shautut Tarbiyah*, *28*(1), 86–98. https://doi.org/10.31332/str.v28i1.3503

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2010). Education and economic growth. In D. J. Brewer & P. J. McEwan (Eds.), *Economics of education* (pp. 60–67). Elsevier.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2012). Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation. *Journal of Economic Growth*, *17*(4), 267–321. https://doi.org/10.1007/s10887-012-9081-x

Hidayah, E. N., Sofiyanti, E., Inayah, I., & Muniati, N. A. N. (2025). Perencanaan berbasis data Rapor Pendidikan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan mutu sekolah. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, *5*(1), 16–23. https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4317

Hidayati, N., Hermiati, H., Muhlisin, M., & Fauyan, M. (2026). Model analisis kebijakan heuristik, evaluatif, dan kritis dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *6*(1), 23–34. https://doi.org/10.37329/metta.v6i1.5191

Khairi, H. (n.d.). *Konsep dasar kebijakan pendidikan* (Modul 1 MPDR5105). Dalam *Kebijakan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar* (hlm. 1.1–1.30). Universitas Terbuka.

Kudus, U. M., & Sutanto, S. (2024). Transformasi pendidikan di sekolah dasar: Peran guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Indonesia. *Jurnal Guru Sekolah Dasar*, *1*(1), 69–76. https://doi.org/10.70277/jgsd.v1i1.0009

Kwartarani, Y., Handoyo, E., & Rokhman, F. (2025). Kebijakan pengembangan mutu pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Journal of Innovative and Creativity*, *5*(3), 33191–33203. https://doi.org/10.55606/jic.v5i3.33191

Maulani, G. (2024). Metode penelitian dan riset kebijakan pendidikan. Dalam A. C. Purnomo (Ed.), *Kebijakan pendidikan* (hlm. 226–237). Sada Kurnia Pustaka.

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edisi ke-3). SAGE Publications.

Missouri, R. (2024). Kebijakan program sekolah gratis. Dalam A. C. Purnomo (Ed.), *Kebijakan pendidikan* (hlm. 156–170). Sada Kurnia Pustaka.

Mudatsir. (2024). Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Dalam A. C. Purnomo (Ed.), *Kebijakan pendidikan* (hlm. 197–208). Sada Kurnia Pustaka.

Nansi, W. S. (2024). Kebijakan pendidikan di era otonomi daerah. Dalam A. C. Purnomo (Ed.), *Kebijakan pendidikan* (hlm. 54–71). Sada Kurnia Pustaka.

Nurhayati, R., Hajaroh, M., Purwastuti, L. A., & Rohman, A. (2024). Training on education policy analysis for education stakeholders in Brebes. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, *11*(1), 99–112. https://doi.org/10.21831/jppm.v11i1.72653

Perdana, T., & Ritonga, M. (2026). Transformation of madrasah education management: The implementation of performance-based planning and budgeting policies. *Progressive of Cognitive and Ability*, *5*(1), 1–11. https://doi.org/10.56855/jpr.v5i1.1902

Pratiwi, D. (2024). Konsep dasar kebijakan pendidikan. Dalam A. C. Purnomo (Ed.), *Kebijakan pendidikan* (hlm. 1–9). Sada Kurnia Pustaka.

Prayoga, R. (2026, 23 Juli). Wamendikdasmen: Jangan anggap BOSP bonus atau hadiah belanja bebas. *ANTARA News*. https://www.antaranews.com/berita/5662393/wamendikdasmen-jangan-anggap-bosp-bonus-atau-hadiah-belanja-bebas

Purnomo, A. C. (Ed.). (2024). *Kebijakan pendidikan*. Sada Kurnia Pustaka.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. (2026, 15 Juni). *Kebijakan pendidikan harus berdampak pada ekosistem pendidikan*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/kebijakan-pendidikan-harus-berdampak-pada-ekosistem-pendidikan/

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. (2026a). *Beranda Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://pskp.kemendikdasmen.go.id/

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. (2026b, 12 Agustus). *PSKP dorong pemutakhiran Dapodik untuk perkuat Rapor Pendidikan 2026*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://pskp.kemendikdasmen.go.id/kabar/detail/pskp-dorong-pemutakhiran-dapodik-untuk-perkuat-rapor-pendidikan-2026

Putra, S. (2024). Isu-isu kebijakan pendidikan. Dalam A. C. Purnomo (Ed.), *Kebijakan pendidikan* (hlm. 10–24). Sada Kurnia Pustaka.

Putra, W., Sujirman, S., Riyan, Harmi, H., Ifnaldi, I., & Ristianti, D. H. (2025). Revolutionizing RKAS with data: Achieving efficient and accountable school financial management. *Journal of Educational Management Research*, *4*(3), 894–906. https://doi.org/10.61987/jemr.v4i3.1048

Ratnawati, E., Masruhim, M. A., Abdunnur, A., & Komariyah, L. (2025). Evaluasi kebijakan sekolah dalam meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik di SMP Negeri 1 Anggana. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, *5*(4), 1441–1451. https://doi.org/10.51878/social.v5i4.7994

Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan pendidikan: Dari filosofi ke implementasi*. Pustaka Setia.

Samsilayurni, & Surismiati. (n.d.). *Kebijakan pendidikan* [Buku ajar perkuliahan]. Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas PGRI Palembang.

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477

Siregar, W., Lubis, M. J., & Darwin, D. (2022). Kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen sekolah. *Jurnal Basicedu*, *6*(3), 3867–3874. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2766

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Susisanti, S. (2022). Hubungan transparansi dan akuntabilitas dengan partisipasi komunitas SMA Negeri 26 Bone. *Manajemen Pendidikan*, *17*(1), 22–35. https://doi.org/10.23917/jmp.v17i1.15407

Syafi'i, A., Bahar, B., Shobicah, S., & Muharam, A. (2023). Pengukuran indeks mutu pendidikan berbasis standar nasional. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(7), 1697–1701. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.332

Widiyawati, T. E., Sa'adah, N., & Nurkolis. (2025). Perencanaan berbasis data melalui Rapor Pendidikan dalam penyusunan RKAS di sekolah dasar. *JANACITTA*, *8*(1), 22–26. https://doi.org/10.35473/janacitta.v8i1.3661

Yunitasari. (2024). Perumusan kebijakan pendidikan. Dalam A. C. Purnomo (Ed.), *Kebijakan pendidikan* (hlm. 25–37). Sada Kurnia Pustaka.

Yuza, S. F., & Jannah, M. (2026). Kajian meta-analisis: Indikator prioritas Rapor Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, *6*(1), 548–563. https://doi.org/10.51878/learning.v6i1.9216

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16477